

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA SEMARANG**

DISERTASI



Oleh :

ROSALINA Br GINTING

14020110500009

**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2016


Lembar Pengesahan Disertasi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA SEMARANG**

Tim Promotor

Telah Disetujui Oleh:

Promotor



Prof.Drs. Y. Warella, MPA.,PhD.

Co Promotor I



Prof.Dr. Dra Sri Suwitri, MSi.

Co Promotor II



Prof. Dr. Paulus Israwan S, MS

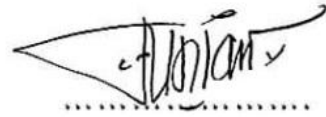
Lembar Pengesahan Disertasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA SEMARANG

Tim Penguji

Telah Disetujui Oleh:

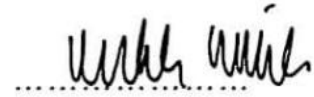
Prof. Dr. Dra. Etty Susilowati, M.Si.



Dr. Nurmah Semil, M.Si



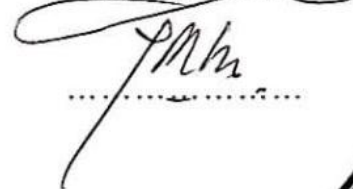
Prof. Dr. Ir. Mukh. Arifin, M.Sc



Dr. Sundarso, SU



Dr. Kismartini, M.Si



PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Bersama ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dibuat dan diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Semarang, Mei 2016

Mahasiswa

Nama : Rosalina Br Ginting

NIM : 14020110500009

Program Doktor Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

RIWAYAT HIDUP

Rosalina Ginting lahir di Kabanjahe pada tanggal 24 September 1964, adalah anak sulung dari lima bersaudara; putra dari bapak Mburak Felix Ginting (Alm) dengan ibu Lape Sembiring.

Meraih gelar sarjana ilmu administrasi negara pada Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 1987. Meraih gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2003.

Bekerja sebagai Dosen Kopertis Wilayah I Medan dpk pada Universitas Karo Kabanjahe sejak tahun 1988 sampai dengan 1993. Pada tahun 1994 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Dosen Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dpk pada Universitas PGRI Semarang, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan (FPIPSKR), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata kuliah yang diampu pada program studi tersebut adalah Kebijakan Publik, Sejarah Ketatanegaran Republik Indonesia dan Pendidikan Pancasila.

Pada Tahun 1999 s.d. 2001 menjabat sebagai ketua Jurusan PPKn IKIP PGRI Semarang. Pada Tahun 2003 s.d. 2007 menjabat sebagai Sekretaris Program Studi PPKn IKIP PGRI Semarang. Tahun 2007 s.d. 2011 menjabat sebagai Ketua Program Studi PPKn. Tahun 2010 s.d 2014 menjabat sebagai Wakil Dekan I FPIPS IKIP PGRI Semarang. Tahun 2014 s.d sekarang menjabat Wakil Dekan I FPIPSKR Universitas PGRI Semarang.

Semarang, Mei 2016

Rosalina Br Ginting

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatNYA sehingga disertasi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam penyelesaian perkuliahan pada Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang. Disertasi ini mengambil judul Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof.Dr.H.Yos Yohan Utama,SH,M.Hum sebagai Rektor dan seluruh Civitas Akademika Universitas Diponegoro Semarang
2. Dr.Drs.Sunarto, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang, yang memberi kesempatan pada penulis menempuh pendidikan pada program studi Doktor Administrasi Publik.
3. Prof. Y. Warella, MPA, PhD selaku Promotor atas waktu, pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Prof Dr.Dra. Sri Suwitri, M.Si selaku co promotor atas waktu, bimbingan dan koreksi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
5. Prof. Dr. Paulus Israwan.S,MS selaku co promotor II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Prof.Dr.Ir.Mukh Arifin, M.Sc; Prof.Dr.Dra.Etty Susilowati, M.Si; Dr.Sundarso,SU; Dr.Kismartini, M.Si; dan Dr. Nurmah Semil, M.Si

sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan guna kesempurnaan disertasi ini.

7. Seluruh Staf Pengajar Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan wawasan keilmuan serta rekan-rekan mahasiswa Angkatan I Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang yang turut memberikan dorongan dan bantuan demi selesainya disertasi ini.
8. Dr. Sudharto, MA, selaku Ketua Yayasan Pembina PT Universitas PGRI Semarang, yang telah memberikan ijin dan bantuan moril bagi penulis untuk menempuh program doktor di Universitas Diponegoro Semarang.
9. Dr. Muhdi, SH,M.Hum, selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan ijin, bantuan moril dan material serta kesempatan untuk menempuh program doktor dan memberikan dukungan dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UDINUS Semarang, UNIVERSITAS PGRI Semarang, STEKOM dan PTS lain di lingkungan Kopertis Wilayah VI dan seluruh informan pada PTS di kota Semarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan telah membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam disertasi ini.
11. Teman-teman staf pengajar di lingkungan FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, yang telah memberikan semangat serta dukungan moril kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
12. Saudara Noor Rochman, SPd yang telah membantu secara teknis dalam penyusunan disertasi ini
13. Suamiku tercinta Drs. Jansen Tarigan dan anak-anakku tersayang Liyandri Rasbina Tarigan serta Rebecca Dwi Yunita Tarigan yang telah menginspirasi dan selalu memotivasi penulis selama menempuh studi di Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Semarang.

14. Ibunda tercinta Lape Sembiring yang selalu memberi semangat, dukungan dan do'a selama penulis menempuh pendidikan pada program Doktor Administrasi Publik sampai dengan terselesaikannya disertasi ini.
15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan sehingga memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis sangat terbuka menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan penulisan disertasi ini. Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama pada dunia ilmu pengetahuan.

Semarang, Mei 2016

Rosalina Br Ginting

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerahnya penulis dapat menyelesaikan disertasi berjudul Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.

Dalam penyusunan disertasi ini berbagai hambatan dan kesulitan yang penulis alami, namun berkat usaha serta lindungannya penulis dapat melewati sampai terselesaikannya disertasi ini. Di bawah bimbingan promotor Prof.Y.Warella,MPA,PhD dan Prof.Dr.Dra.Sri Suwitri, M.Si selaku co-promotor I serta Prof.Dr.Paulus Israwan.S.MS selaku co-promotor II yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau bertiga atas keikhlasan dan ketulusannya melakukan pembimbingan.

Akhirnya penulis membuka diri bagi masukan dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan disertasi ini, sehingga dapat menambah khasanah pada ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga terhadap implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Semarang, Mei 2016

Rosalina Br Ginting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang dilihat dari perspektif Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang; (3) Memformulasikan model implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang belum terlaksana secara maksimal, demikian juga dengan pencapaian hasilnya. Belum maksimalnya implementasi tersebut disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain: (1) Belum adanya koordinasi antar lembaga Pemerintah, Kopertis Wilayah VI dan perguruan tinggi swasta, (2) Kurangnya potensi sumber daya (SDM dan Dana) pada PTS dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu; (3) Komunikasi dan mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS belum berjalan efektif.

Kata Kunci; Implementasi kebijakan, Kebijakan penjaminan mutu, Perguruan tinggi swasta.

ABSTRACT

This research aims to : (1) Describing and analyze the implementation of the quality assurance policy of the private of higher education institutions in Semarang viewed from the perspective of the National standards of higher education; (2) To identify and analyze quality aspects which contribute to and inhibit the implementation of the quality assurance policy of the private higher education institutions in Semarang ; (3) To formulate the implementation model of the education quality assurance which effective and appropriate with the needs to facilitate the improvement of the education quality of the private higher education institutions in Semarang . This study used a qualitative approach with the descriptive analysis. This result of the research show that in general the implementation of quality assurance policy at private higher education institutions in Semarang has not been done maximally and the achievement of the results has not been maximal as well. This is because there are some obstacles, among others: (1) Lack of coordination between the government institutions and private of higher education institutions; (2) Lack of the potential resources (human financial resources) of the private higher education institutions in the implementation of quality assurance policy; (3) Ineffective communication and working mechanism in the implementation of quality assurance policy of the private of higher education institutions.

Keywords: Policy Implementation, Private Higher Education and Quality Assurance Policy.

RINGKASAN

Kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan prioritas (Tilaar, 2009). Dalam rangka memajukan sumber daya seluruh anggota masyarakat agar menjadi sumber daya pembangunan dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan secara terus menerus. Komitmen Pemerintah terhadap penjaminan mutu pendidikan tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, yang menjelaskan bahwa penjaminan perguruan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun permasalahan penelitian dalam disertasi ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang?; (2) Aspek-aspek apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang?; dan (3) Bagaimana model implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta di Kota Semarang?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang dilihat dari perspektif Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang; (3) Memformulasikan model implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.

Pengkajian teori administrasi publik untuk memberikan jawaban teoritik atas masalah yang diajukan berhubungan dengan implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku saat ini, diawali dengan melakukan pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, kemudian mengkaji teori-teori yang mencakup: teori kebijakan publik; proses kebijakan publik; teori kebijakan pendidikan; penjaminan mutu pendidikan serta implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis data berproses secara induktif dengan metode pengumpulan

data *In-dept Interview*, observasi , dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan uji keabsahan data menggunakan dua cara, yaitu teknik *triangulasi* dan *peer debriefing*. Aktivitas dalam analisis data , yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman (2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang belum terlaksana secara maksimal, demikian juga dengan pencapaian hasilnya. Belum maksimalnya implementasi tersebut disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain: (1) Belum adanya koordinasi antar lembaga Pemerintah dengan perguruan tinggi swasta, (2) Standarisasi mutu oleh lembaga independen (BAN-PT) pada institusi PTS masih rendah; (3) Kurangnya potensi sumber daya (SDM dan Dana) pada PTS dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu; (4) Komunikasi dan mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS belum berjalan efektif.

Model implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi yang diusulkan yaitu: (1) meningkatkan koordinasi dengan optimalisasi Pemerintah dan kopertis wilayah VI Jawa Tengah serta PTS (2) Merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi PTS dan dukungan stakeholders lebih maksimal terutama dari Kopertis Wilayah VI sebagai lembaga Wasdalbin PTS; (3) Memenuhi keseimbangan sumber daya manusia dan finansial PTS baik kualitas maupun kuantitas dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi; (4) Komunikasi dan mekanisme kerja yang jelas dan sesuai ketentuan.

SUMMARY

The national development policy in the education field is part of the public policy. Therefore, the education policy becomes the sectoral policy that has to compete with the other sectors to gain the priority (Tilaar, 2009). The effort to promote the resources of all the society members to become the development resources can be taken by improving the education quality continually. The government commitment towards the education quality assurance is written in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2012 about the Higher Education Articles 51 – 57 that dictate that the quality assurance of higher education is a systemic activity to improve higher education quality in a planned and sustainable way. The problems in this dissertation are: (1) how is the implementation of the quality assurance policy of the private higher education institutions in Semarang? (2) What aspects contribute to and inhibit the implementation of the quality assurance policy of the private higher education institutions in Semarang? (3) What is the implementation model which is effective and appropriate with the needs to facilitate the improvement in the education quality of the private higher education institutions in Semarang?

The objectives of this research are: (1) To describe and analyze the implementation of the quality assurance policy of the private higher education institutions in Semarang viewed from the perspective of the National Standards of Higher Education. Tujuan penelitian ini adalah untuk (2) To identify and analyze the aspects which contribute to and inhibit the implementation of the quality assurance policy of the private higher education institutions in Semarang. (3) To formulate the implementation model of the education quality assurance policy which is effective and appropriate with the needs to facilitate the improvement of the education institutions in Semarang.

The review of public administration theories to provide the theoretical answer to the problems related to the implementation of the present quality assurance policy in the higher education begins with the discussion of the previous studies which are relevant to the study which will be conducted by the writer, followed by the examination of the theories which include the public policy theories, the public policy processes, the education policy theories, the education quality assurance, and the implementation of quality assurance policy of the higher education institutions.

The research used the qualitative approach with the descriptive analysis. The analysis was conducted through interviews and direct observations in the field. Since the research employed the qualitative approach; the data analysis was conducted through the inductive process using data collection method including In-dept Interviews, observations, documentation, and library research with the two way data validity test,

that is, the triangulation and peer debriefing technique. The activities in the data analysis include the data collection, data condensation, data presentation, and inference according to Miles and Huberman's model (2014).

The results of the study show that in general the implementation of the quality assurance policy of the education quality of the private higher education quality of the private higher education institutions in Semarang has not been done maximally. This is because there are some obstacles, among others: (1) lack of coordination between the government institutions, (2) low quality standardization by independent agencies (BAN-PT) in the private higher education institutions, (3) lack of potential resources (Human and Financial Resources) of the private higher education institutions in the implementation of the quality assurance policy, (4) ineffective communication and working mechanisms in the implementation of the quality assurance policy of the private higher education institutions.

The proposed implementation model of the quality assurance policy of the higher education are: (1) Improving the coordination between the government and the private higher education institutions coordinator (Kopertis) of Region VI of Central Java and the private higher education institutions. (2) Formulating the policy based on the conditions of the private higher education institutions and maximizing the stakeholders especially the Kopertis region VI of Central Java as the supervising, controlling and nurturing (Wasdalbin) institution, (3) balancing between the human and financial resources of the private higher education in terms of quality and quantity in the implementation of the quality assurance policy; (4) establishing the clear and appropriate communication and working mechanisms.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR DIAGRAM.....	xxii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Permasalahan Penelitian	15
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Manfaat Praktis	17
1.4.2 Manfaat Teoritis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Penelitian Terdahulu.....	19
2.2. Kebijakan Publik	42
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	42
2.3. Kebijakan Publik Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Negara.....	45
2.4. Proses Kebijakan Publik	49
2.5. Implementasi Kebijakan Publik.....	54
2.6. Model-Model Dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	61
2.7. Kebijakan Pendidikan	72
2.7.1. Aspek Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan.	74
2.8. Penjaminan Mutu Pendidikan	77
2.8.1. Konsep mutu	77
2.8.2. Kebijakan Penjaminan Mutu di Indonesia.....	83
2.8.3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	85
2.9. Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	95
2.10. Alur Pikir	103

BAB III METODE PENELITIAN	112
3.1 Desain Penelitian.....	112
3.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian	114
3.3 Lokasi Penelitian.....	116
3.4 Metode Pengumpulan Data	117
3.4.1 Observasi Non-Partisipasi (Non-Participant Observation) ..	117
3.4.2 Wawancara Mendalam (in-depth interview)	117
3.4.3. Studi Dokumentasi	118
3.5 Fokus Penelitian	119
3.6 Sumber Data Penelitian.....	122
3.6.1. Sumber data primer	122
3.6.2. Data sekunder.....	122
3.7 Informan dan Teknik Pemilihan Informan	123
3.8 Tahap dan Prosedur Penelitian	124
3.9 Instrumen Penelitian	125
3.10 Teknik Keabsahan Data	125
3.11 Pengolahan dan Analisis Data.....	127
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	130
4.1 Gambaran Umum Kota Semarang	130
4.1.1 Administrasi Pemerintahan Kota Semarang	130
4.1.2 Demografi	131
4.2 Gambaran Umum Pendidikan Kota Semarang.....	132
4.3 Gambaran Umum Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.	133
4.3.1. Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Universitas PGRI Semarang	133
4.3.1.1. Konten Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang	137
4.3.1.2 Konteks Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang	139
4.3.1.3 Komunikasi Yang Dilakukan Pada Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang.....	143
4.3.1.4 Sumber daya dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu Universitas PGRI Semarang	144
4.3.2 Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Universitas Dian Nuswantoro.....	146
4.3.2.1. Konten Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro.....	147
4.3.2.2. Konteks Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro.....	150
4.3.2.3. Komunikasi Yang Dilakukan Pada Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang.....	152

4.3.2.4.	Sumber Daya Dalam implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Universitas Dian Nuswantoro	154
4.3.3	Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer Semarang.....	156
4.3.3.1.	Konten Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang.....	157
4.3.3.2.	Konteks Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer	159
4.3.3.3	Komunikasi Yang Dilakukan Pada Kebijakan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang.	160
4.3.3.4	Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer.	161
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS		165
5.1	Penyajian Data	165
5.1.1.	Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Semarang	165
5.1.1.1	Pangkalan Data Perguruan Tinggi Swasta.....	165
5.1.1.2	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Swasta	176
5.1.1.3	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	188
5.1.2.	Aspek Pendukung dan Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta	194
5.1.2.1.	Aspek Pendukung Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta .	195
5.1.2.2.	Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta	262
5.2	Pembahasan	284
5.2.1	Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Semarang.....	284
	Proposisi Minor 1	303
5.2.2	Aspek Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta	305
	Proposisi Minor 2.	311
5.2.3	Model Existing Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.	314
	Proposisi Mayor	319
	Model Usulan	329
BAB VI PENUTUP		347
6.1.	Kesimpulan	347

6.2. Rekomendasi.....	353
6.3. Implikasi Hasil Penelitian.....	354
6.3.1. Implikasi Teori	354
6.3.2. Implikasi Praktis.....	356
6.4. Keterbatasan Penelitian.....	357

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan tinggi berdasarkan KPPT-JP 1996- 2005.....	2
Gambar	2.1	Tahapan Kebijakan Publik – Ripley (1985).....	51
Gambar	2.2	Kerangka Kerja Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	64
Gambar	2.3	Model Implementasi Edward III	66
Gambar	2.4	Model Implementasi Kebijakan-Van Meter dan Van Horn.....	69
Gambar	2.5	Model Komunikasi dari Implementasi Kebijakan Antar Pemerintah (The Communication Model of Intergovernmental Policy Implementation)	72
Gambar	2.6	Kebijakan Nasional SPM-PT	84
Gambar	2.7	Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Internal dan Eksternal	89
Gambar	2.8	Hubungan sistem evaluasi terpadu dengan sistem penjaminan mutu terpadu.....	95
Gambar	2.9	Alur Pikir Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	105
Gambar	3.1	Komponen Analisis Data (Model Interaktif)	128
Gambar	4.1	Peta Wilayah Kota Semarang	131
Gambar	4.2	Kedudukan BPM dalam Struktur Organisasi UPGRIS.....	145
Gambar	4.3	Struktur Organisasi Udinus.....	152
Gambar	4.4	Struktur KPM Udinus.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Program Studi Menurut Jenjang dan Bentuk PTS Tahun 2013/2014.....	9
Tabel 1.2	Data PTS di Kota Semarang T.A. 2015/2016	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Operasionalisasi Konsep Penelitian	114
Tabel 4.1	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang 2014	132
Tabel 4.2	Jumlah Murid Kota Semarang Negeri dan Swasta 2014	133
Tabel 5.1	12 Wilayah Kopertis.....	223
Tabel 5.2	Matriks Aspek-Aspek Pendukung Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang	305
Tabel 5.3	Matriks Aspek-Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang	309

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	2.1	Langkah Penelitian: Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Semarang.....	111
Diagram	4.1	Sistem Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang.....	142
Diagram	4.2	Sistem Penjaminan Mutu UDINUS.....	151
Diagram	4.3	Sistem Penjaminan Mutu STEKOM.....	160
Diagram	4.4	Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer STEKOM-Semarang.....	163
Diagram	5.1	Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta saat ini.....	292
Diagram	5.2	Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS di Kota Semarang Saat Ini.....	298
Diagram	5.3	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal PTS di kota Semarang saat ini.....	302
Diagram	5.4	Model Eksisting Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.....	317
Diagram	5.5	Mekanisme Existing Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.....	318
Diagram	5.6	Usulan Model Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu	340
Diagram	5.7	Usulan Mekanisme Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta	341

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAN-PT	:	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi adalah suatu badan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua institusi pendidikan tinggi meliputi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta atau sering disebut <i>National Accreditation Board (NAB)</i>
Bottom-up	:	Pendekatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui proses yang mengutamakan masukan dari bawah.
DGHE	:	<i>Directorate General Higher Education/</i> Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi adalah merupakan direktorat yang bertugas menangani dan membina bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
EPSBED	:	Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri adalah format laporan wajib dari DIKTI yang mengharuskan seluruh perguruan tinggi memberikan laporan pada setiap semester.
External Expert/ Peer Evaluation	:	Evaluasi Eksternal adalah proses penilaian capaian mutu Program studi dan atau institusi oleh lembaga di luar Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
HELTS	:	<i>Higher Education Long Term Strategy/</i> Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang adalah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu 1) kontribusi perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa (<i>nation competitiveness</i>), 2) pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang dan tanggungjawab kepada perguruan tinggi (<i>autonomy</i>), 3) penciptaan kesehatan organisasi internal perguruan tinggi (<i>organizational health</i>).
Internal self evaluation	:	Evaluasi diri internal adalah suatu kegiatan evaluasi mutu internal berupa data dari, oleh, dan untuk perguruan tinggi
KPPTJP	:	Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang merupakan kebijaksanaan dasar pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang mulai tahun 19975 sampai dengan 2005.

Kopertis	:	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.
K3A	:	Komisi Koordinator Kegiatan Akademik adalah Tim/Komisi yang bertugas untuk menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran semester dan melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.
Parents	:	Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
PD Dikti	:	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan tinggi yang pengelolaannya dan regulasinya dilakukan oleh swasta.
QA	:	Quality Assurance/ Penjaminan Mutu adalah suatu sistem pengendalian kualitas yang harus dipenuhi didalam pembuatan produk dari mulai proses awal hingga akhir sehingga didapat out put dengan kualitas yang terjamin.
QC	:	Quality Control/ Pengawasan mutu adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan mutu dalam suatu organisasi untuk menghasilkan suatu produk atau pelayanan yang memuaskan konsumen.
Renstra	:	Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi dan arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia.
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan

- dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sistem penjaminan mutu yang bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi.
- SPM-PT : Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- SNP : Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- SNPT : Satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Top-Down : Pendekatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berorientasi dari atas ke bawah, sentralistik, dan bersifat directive, dapat meliputi aspek tujuan, mekanisme maupun pelaksanaan.
- YPLP PT- PGRI : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia.